



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 63.2/UN27/HK/2023

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN JASA NON KONSULTANSI
UNIT KERJA LINGKUP KANTOR PUSAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa non konsultansi dengan metode pembelian langsung untuk Unit Kerja Lingkup Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, dimana Rektor menetapkan Pejabat Pengadaan sebagai Penanggung Jawab Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pejabat Pengadaan Jasa Non Konsultansi Unit Kerja Lingkup Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 33/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 16 Januari 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengadaan Jasa Non Konsultansi Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEJABAT PENGADAAN JASA NON KONSULTANSI UNIT KERJA LINGKUP KANTOR PUSAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Chandrarina Ike Torananingrum, NIP. 198404252010122005, Tenaga Kependidikan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Non Konsultansi Unit Kerja Lingkup Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk nominal sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:

1. menetapkan spesifikasi untuk pengadaan yang menggunakan surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan;
2. memvalidasi nota/struk/bukti pembelian langsung;
3. menandatangani surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan; dan
4. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Rektor;

KELIMA : Pejabat Pengadaan dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan dengan Pelaku Usaha apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia;

- KEENAM : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
4. Kepala UPT Remunerasi; dan
5. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

